

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan sektor pertanian sampai saat ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Selain sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan petani, sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan nasional. Namun yang saat ini terjadi di Indonesia adalah munculnya masalah-masalah pertanian seperti yang tercantum dalam Konsep Pembangunan Nasional. (Apriantono A. 2004).

Masalah pertanian yang umumnya terjadi pada petani di Indonesia antara lain adalah masalah kondisi petani, lemahnya organisasi petani dan masalah permodalan. Masalah permodalan juga tak pernah lepas dari petani, rendahnya permodalan yang di miliki petani akan berdampak pula terhadap pendapatan petani nantinya. Petani mengatasi kendala modal tersebut dengan menggunakan modal sendiri atau meminjam kredit program maupun kredit yang sifatnya komersial. Lembaga keuangan resmi, termasuk kredit program pemerintah, memerlukan berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi petani berskala kecil.

Hasil penelitian Hastuti dan Supadi (2001) menunjukkan bahwa kredit non formal lebih fleksibel, prosedurnya mudah serta saling mengenal antara kreditur dan debitur. Sedangkan kredit formal kurang fleksibel, prosedur pengajuannya lebih sulit, perlu waktu yang relatif lama dari mengajukan hingga menerima kredit. Kadang-kadang debitur perlu biaya tambahan untuk mengurus kredit.

Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor. Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, penggunaan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun untuk sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usaha padat modal dengan dana sendiri (Syukur et all, 2000).

Mengingat peran kredit dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, telah mendorong pemerintah (di banyak Negara) menjadikannya sebagai instrument kebijakan yang penting. Kredit dianggap sebagai salah satu alat penting untuk memutuskan “lingkaran setan” dari pendapatan rendah, menumpuk modal rendah, kemampuan membeli sarana produksi rendah, produktivitas usaha tani rendah, dan pendapatan rendah (Syukur et all, 2000).

Dengan adanya permasalahan seperti diatas, maka pemerintah mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Sejak tahun 1967 pemerintah telah melaksanakan program-program perkreditan yang dibantu oleh bank-bank Negara. Mulai dari program BIMAS, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), BLM/BPLM/PMUK, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani (Nelayan Kecil (P4k), Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP), Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dan yang baru saja dilaksanakan tahun 2008 adalah Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dimulai pada tahun 2008. Program ini ditargetkan untuk 10.000 desa diseluruh Nusantara. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis perdesaan dengan meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis melalui pemberdayaan dan peningkatan fungsi kelembagaan petani dalam usaha agribisnis pedesaan.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) mempunyai beberapa tujuan yang tertulis pada Pedoman PUAP (2010), yaitu ; (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah. (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani. (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.

(4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (BPTP Sumatera Barat 2010).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pemingkatan (*Ranking*) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A, merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di perdesaan. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di perdesaan guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan untuk membiayai usaha agribisnis.

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, LKM-A harus tetap berjalan dan dapat meningkatkan kinerjanya, baik dari kinerja keuangan, dan pelayanan terhadap konsumen organisasi (nasabah). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan LKM-A dengan metode yang tepat untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja keuangan LKM-A tersebut telah berjalan.

B. Rumusan Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh Gapoktan penerima dana PUAP dan memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana PUAP kepada anggota.

LKM-A mulai dipopulerkan di Sumatera Barat pada tahun 2006 dengan harapan membantu petani agar bisa mendapatkan modal dari petani yang menjadi anggota, lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit. Dengan keberadaan lembaga ini, petani diharapkan tidak mendapatkan kesulitan lagi ketika ingin mendapatkan modal untuk bertani. Sejumlah 1037 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) tersebar di 18 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat menurut laporan bulanan pertanggungjawaban BMT Provinsi Sumatera Barat per Juli 2016. Jumlah asset awal yang didistribusikan untuk keseluruhan LKM-A yang ada di Sumatera Barat ini adalah sebesar 106.405.347.324; dan mengalami

pertumbuhan asset pada akhir Juli 2016 sebesar 163.694.558.683 berdasarkan laporan pertanggungjawaban PMT Sumatera Barat per Juli 2016.

Kota Padang Panjang menduduki peringkat empat terbawah ditinjau dari perkembangan asset LKM-A (Lampiran 1). Jumlah LKM-A di Kota Padang Panjang adalah sebanyak 14 LKM-A yang tersebar merata di Kecamatan Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat (Lampiran 5). Meskipun Kota Padang Panjang menduduki peringkat empat terbawah, namun ada salah satu LKM-A yang memiliki catatan prestasi yang baik yakni LKM-A Melati yang berada di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Pengembangan Gabungan Kelompok Tani Melati diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan para anggota dalam pengembangan agribisnis, dan penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat serta mandiri. Gabungan Kelompok Tani Melati berdiri tahun 2010 dan dikukuhkan oleh Lurah Tanah Hitam, sesuai surat keputusan lurah No. 09 tahun 2010 yang berkembang sampai sekarang dan pada tanggal yang sama LKM-A Melati disahkan (Lampiran 2).

LKM-A Melati pada tahun 2015 mendapat penghargaan sebagai LKM-A berprestasi tingkat Kota Padang Panjang, LKM-A Melati mendapatkan prestasi sebagai LKM-A dengan pengelolaan yang baik dilihat dari tingkat pengembalian dana yang tinggi. Dari jumlah dana yang dikelola, LKM-A Melati cukup berhasil dalam menyalurkan pinjaman dana kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah modal pada tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,- meningkat menjadi Rp 151.870.250,- pada bulan September tahun 2017 atau bertambah sebanyak 51,87 % (Lampiran 3). Namun, LKM-A Melati mengalami penurunan jumlah anggota pada tahun 2014 dan 2016 (Lampiran 4). LKM-A Melati berhasil dalam penyaluran dana, dengan NPL terakhir pada bulan Desember 2017 adalah sebesar 0% (Lampiran 5), oleh sebab itu perlu diteliti kinerja LKM-A Melati sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Kajian kinerja menyangkut rasio-rasio neraca keuangan. *Outreach* atau rasio-rasio neraca keuangan yang dianggap penting dalam menilai keberhasilan suatu lembaga keuangan karena mendasarkan kenyataan bahwa LKM (Lembaga Keuangan Mikro) fokus pada menawarkan pelayanan finansial kepada sebagian besar masyarakat miskin pada satu sisi dan pencapaian skala ekonomis pada sisi lain (Wardoyo, 2005).

Melihat pentingnya LKM-A Melati untuk melakukan pengendalian internal, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, maka perlu dilakukan analisis kinerja dengan mengetahui kondisi keuangan LKM-A Melati di Kelurahan Tanah Hitam. Kinerja adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irhan Fahmi, 2011)

Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menganalisa kinerja keuangan dari LKM-A Melati di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Penjelasan lebih lanjut maka penting untuk melakukan penelitian ini yaitu tentang **“Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Melati, Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.”**

Berdasarkan uraian diatas untuk pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil LKM-A Melati ?
2. Bagaimana kinerja LKM-A Melati tahun 2011-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan profil LKM-A Melati
2. Untuk menganalisis kinerja LKM-A Melati tahun 2011-2016

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Pihak internal LKM-A dalam pembuatan keputusan dan kebijakan pada masa yang akan datang khususnya dalam pengembangan usaha dengan mengetahui kesehatan lembaga keuangan berdasarkan kinerja yang dicapai.
2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian terkait tentang lembaga keuangan mikro.
4. Sebagai acuan bagi LKM-A lain untuk meningkatkan kinerja LKM-



